



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

Jln. Anwar No. 5 Kel. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33412
Telp. (0719) 21309 www.pa-tanjungpandan.go.id, pa.tanjungpandan.go.id@gmail.com

Tanjungpandan, 29 Juli 2026

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpandan
Jalan Sriwijaya, Paal Satu, Tanjungpandan, 33416
Telp. 0719 21330

SURAT PENGANTAR
Nomor: 181/SEK.PA.W28-A3/KU2.1/VII/2026

NO	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Keuangan Semester I TA 2026 satuan kerja 402318 Pengadilan Agama Tanjungpandan	1 (satu) eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal

Penerima

.....

(.....)

NIP.

Pengirim

Sekretaris,



HADI SISWANTO, S.Kom., M.H.

NIP. 198003292009121001

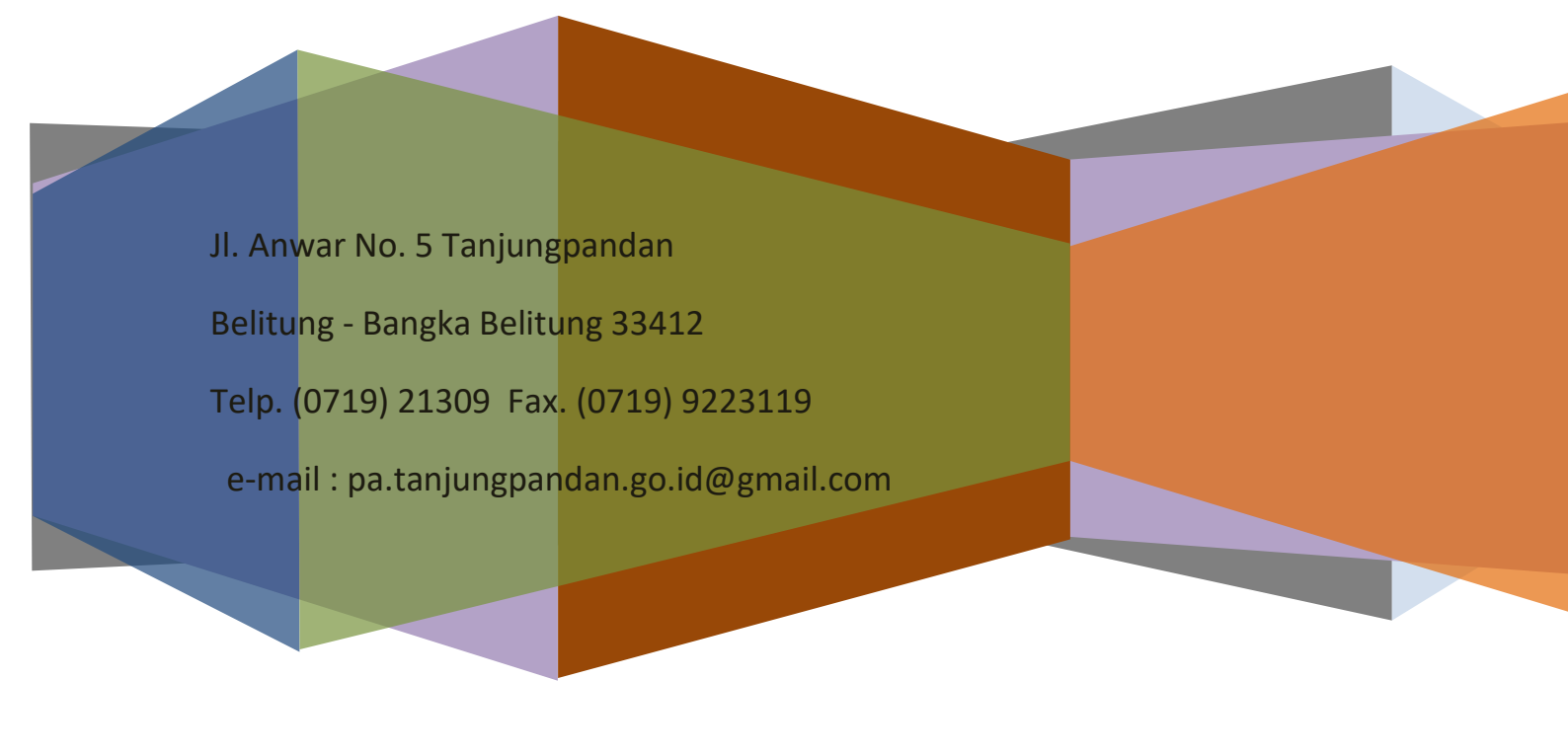
Nomor Telepon

Pos – el

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI TAHUN 2026



Jl. Anwar No. 5 Tanjungpandan

Belitung - Bangka Belitung 33412

Telp. (0719) 21309 Fax. (0719) 9223119

e-mail : pa.tanjungpandan.go.id@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
(402318)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Anwar No. 5 Tanjungpandan

Telp. (0719) 21309 Fax. (0719) 9223119

Belitung - Bangka Belitung 33412

e-mail: pa.tanjungpandan.go.id@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Agama Tanjungpandan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Tanjungpandan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Belitung, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



LADI SISWANTO, S.Kom., M.H.
NIP. 198003292009121001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	15
A.1. Dasar Hukum.....	15
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tanjungpandan	16
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	18
A.4. Basis Akuntansi	19
A.5. Dasar Pengukuran.....	19
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	20
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	28
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	28
B.2. Belanja.....	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
C.1. Aset Lancar.....	33
C.2. Aset Tetap	35
C.3. Aset Lain-lain	39
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	40
C.5. Ekuitas	41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	42
D.1. Pendapatan Operasional	42

D.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	42
D.2. Beban Operasional.....	42
D.2.1. Beban Pegawai	42
D.2.2. Beban Persediaan	44
D.2.3. Beban Barang dan Jasa	44
D.2.4. Beban Pemeliharaan	45
D.2.5. Beban Perjalanan Dinas	45
D.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi	45
D.2.7. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	46
D.3. Kegiatan Non Operasional	47
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
E.1. Ekuitas Awal	48
E.2. Surplus (defisit) LO	48
E.3. Koreksi yang Menambah dan Mengurangi Ekuitas.....	48
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	49
E.5. Ekuitas Akhir.....	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	50
F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	50
F.2. Pengungkapan Lain-lain	50
Daftar dan Lampiran	
A. Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Jln. Anwar No. 5 Kel. Pangkallalang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33412
Telp. (0719) 21309 www.pa-tanjungpandan.go.id, pa.tanjungpandan.go.id@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Pengadilan Agama Tanjungpandan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan per 30 Juni tahun anggaran 2026 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan Pengadilan Agama Tanjungpandan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Belitung, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



MADI SISWANTO, S.Kom., M.H.

NIP. 198003292009121001

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2019 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan keuangan Pengadilan Agama Tanjungpandan semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026.

Realisasi pendapatan negara pada 30 Juni TA 2026 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp308.484 atau mencapai 50% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp617.000.

Realisasi belanja negara pada 30 Juni TA 2026 adalah sebesar Rp4.694.450.510 atau mencapai 57.18% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.209.693.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses sistem akuntansi instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 dan telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan 215/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.292.347.113 yang terdiri dari: aset lancar sebesar Rp55.727.774, aset tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp11.236.619.339, aset lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp470.624.833, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp470.624.833.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp10.821.722.280.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp359.898, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp4.603.845.835, surplus/defisit dari kegiatan operasional senilai Rp(4.603.485.937). Pendapatan kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp0 dan beban dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp0, surplus/defisit dari kegiatan non operasional senilai Rp0 sehingga entitas mengalami surplus/defisit-LO sebesar Rp(4.603.485.937).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 adalah sebesar Rp10.731.066.191 dikurangi surplus/defisit-LO sebesar Rp(4.603.485.937) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp4.694.142.026 sehingga ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp10.821.722.280.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, pendapatan negara dan hibah dan belanja negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian neraca untuk periode per 30 Juni 2026, nilai aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	30 Juni 2026			30 Juni 2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	617.000	308.484	50	308.484
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		617.000	308.484	50	308.484
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	6.866.616.000	4.107.928.949	59.82	1.705.161.983
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.323.077.000	566.521.563	42.82	522.195.129
3.	Belanja Modal	B.2.3.	20.000.000	19.999.998	100	109.999.200
	Jumlah Belanja Negara		8.209.693.000	4.694.450.510	57.18	2.337.356.312

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

NERACA

PER 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	36.000.000	0
Belanja Dibayar Di Muka	C.1. 2.	0	4.245.556
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	51.414	0
Persediaan	C.1. 4.	19.676.360	16.985.058
Jumlah Aset Lancar		55.727.774	21.230.614
Aset tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	8.951.568.000	8.951.568.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.065.825.779	2.048.471.779
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	2.947.715.000	2.947.715.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	927.109	927.109
Akumulasi Penyusutan	C.2. 5.	(2.729.416.549)	(2.619.655.833)
Jumlah Aset Tetap		11.236.619.339	11.329.026.055
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3. 1.	960.308.153	960.308.153
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	(960.308.153)	(959.690.153)
Jumlah Aset Lainnya		0	618.000
Jumlah Aset		11.292.347.113	11.350.874.669
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	425.481.933	619.808.478

Utang yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	9.142.900	0
Uang Muka dari KPPN	C.4. 3.	36.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		470.624.833	619.808.478
Jumlah Kewajiban		470.624.833	619.808.478
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	10.821.722.280	10.731.066.191
Jumlah Ekuitas		10.821.722.280	10.731.066.191
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		11.292.347.113	11.350.874.669

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D. 1	359.898	359.898
Jumlah Pendapatan		359.898	359.898
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.921.520.271	1.916.143.508
Beban Persediaan	D. 3	12.199.158	10.643.622
Beban Barang dan Jasa	D. 4	364.087.594	331.855.550
Beban Pemeliharaan	D. 5	107.496.924	165.469.799
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	88.163.172	40.417.046
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	110.378.716	117.978.380
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		4.603.845.835	2.582.507.905
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		(4.603.485.937)	(2.582.148.007)
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO		(4.603.485.937)	(2.582.148.007)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	E. 1	10.731.066.191	11.442.183.659
Surplus/Defisit Laporan Operasional	E. 2	(4.603.485.937)	(2.582.148.007)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	4.694.142.026	2.337.047.828
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(90.656.089)	(245.100.179)
Ekuitas Akhir		10.821.722.280	11.197.083.480

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- r. PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Tanjungpandan

Pengadilan Agama Tanjungpandan merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan meliputi 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur dan Kantor Pengadilan Agama Tanjungpandan berkedudukan di Ibukota Kabupaten Belitung, tepatnya berada di Jalan Anwar No.5, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tahun 2026 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2025-2029 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja dan teknologi informasi. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Tanjungpandan pada tahun 2025 sampai dengan 2029 mengacu pada program dan kegiatan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Tanjungpandan.

Visi Mahkamah Agung adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah *“Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjungpandan yang agung”*.

Adapun misi Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah:

1. Meningkatkan kemandirian Pengadilan Agama Tanjungpandan;
2. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan di wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Tanjungpandan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas Pengadilan Agama Tanjungpandan.

Adapun kebijakan teknis Pengadilan Agama Tanjungpandan meliputi kebijakan terkait peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja dilakukan dengan berbagai langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui peraturan-peraturan, surat edaran maupun kebijakan terkait pengelolaan dan penanganan penyelesaian perkara di Peradilan Agama;
2. Melakukan perbaikan sistem karier melalui mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;

3. Melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengajukan usulan-usulan kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga teknis dan non teknis peradilan;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang tertib dan berkelanjutan baik dari internal maupun eksternal, hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memebuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Penguasaan aparatur terhadap standar operasional prosedur (SOP) sesuai bidangnya, hal ini agar terciptanya keteraturan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI);
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.

Sedangkan untuk mendukung kebijakan teknis terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan berbagai langkah sebagai berikut:

1. Menerapkan sistem pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerimaan layanan;
3. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang tertuang dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP);
4. Menerapkan kebijakan bahwa pelayanan prima merupakan salah satu skala prioritas yang memerlukan perhatian khusus dan diutamakan;
5. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan semester I tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan. Laporan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi (SAI) yang seluruh rangkaian dan sistemnya terkomputerisasi di dalam aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) mulai dari pengumpulan data perencanaan, pengelolaan dan pencatatan pertanggungjawaban sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada kementerian negara/lembaga.

Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI) saat ini sudah mencakup sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) dan juga sistem informasi manajemen dan

akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN). Sistem aplikasi keuangan ini dirancang untuk menghasilkan data perencanaan keuangan, pencatatan serta pelaporan keuangan satuan kerja yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional laporan perubahan ekuitas, informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya yang dapat dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Tanjungpandan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan semester I tahun 2026 telah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada kas umum negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan

berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap, piutang jangka panjang dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan penjualan angsuran (TPA) dan tuntutan ganti rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Berdasarkan PMK No. 181/pmk.06/2016 Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang jangka panjang adalah tagihan penjualan angsuran (TPA), tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.247/PMK.06/2014 sebagaimana diubah dengan PMK No. 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang atau pengguna barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;

2. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang atau pengguna barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan;
 3. Aset tetap renovasi berupa tanah; dan
 4. Aset tetap renovasi yang tidak menambah masa manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
 - Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10.) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah:
Rp308.484*

Realisasi pendapatan negara dan hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp308.484 atau mencapai 50% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp617.000. Keseluruhan pendapatan negara dan hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
2.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	617.000	308.484	50
Total Pendapatan		617.000	308.484	50

Perbandingan realisasi PNBP Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	308.484	308.484	0	0
Total Pendapatan		308.484	308.484	0	0

B.2. Belanja

Realisasi Belanja:
Rp4.694.450.510

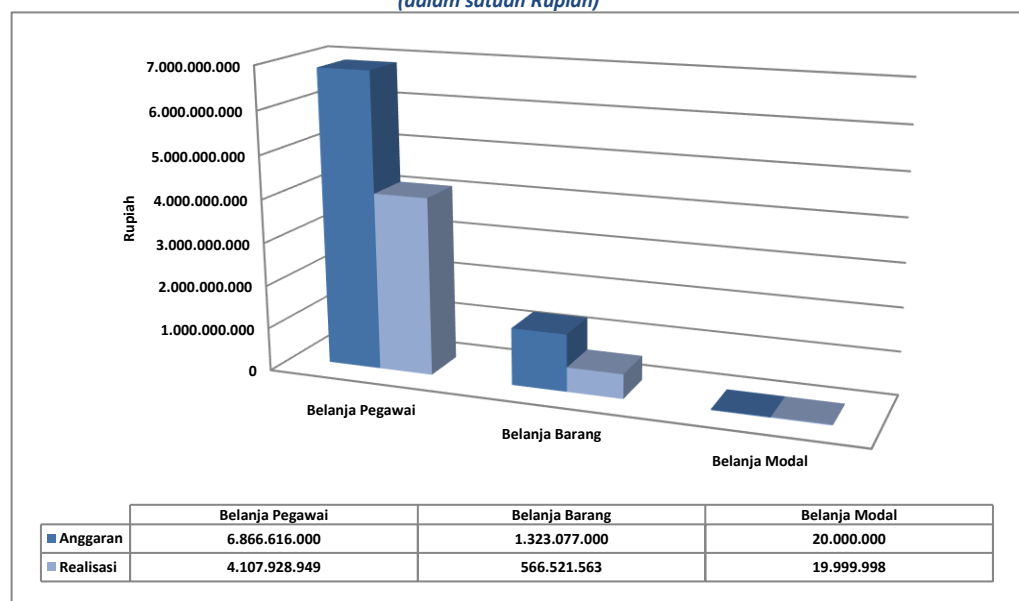
Realisasi belanja Pengadilan Agama Tanjungpandan per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp4.694.450.510 atau sebesar 57.18% dari anggaran senilai Rp8.209.693.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.866.616.000	4.107.928.949	59.82
Belanja Barang	1.323.077.000	566.521.563	42.82
Belanja Modal	20.000.000	19.999.998	100
Total Belanja Bruto	8.209.693.000	4.694.450.510	57.18
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja Neto	8.209.693.000	4.694.450.510	57.18

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi TA 2026

Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni 2026 dan 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	4.107.928.949	1.705.161.983	2.402.766.966	140,91%
Belanja Barang	566.521.563	522.195.129	44.326.434	8,49%
Belanja Modal	19.999.998	109.999.200	(89.999.202)	(81,82%)
Total Belanja	4.694.450.510	2.337.356.312	2.357.094.198	100,84%

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai:
Rp4.107.928.949*

Realisasi belanja pegawai Pengadilan Agama Tanjungpandan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp4.107.928.949 dan Rp1.705.161.983.

Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	626.621.800	617.486.100	9.135.700	1,48%
Beban Pembulatan Gaji PNS	9275.000	9.824	(549)	(5,59%)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	35.980.330	36.087.850	(107.520)	(0,30%)
Beban Tunj. Anak PNS	14.106.814	14.671.918	(565.104)	(3,85%)
Beban Tunj. Struktural PNS	20.800.000	20.800.000	0	0,00%
Beban Tunj. Fungsional PNS	32.200.000	32.130.000	70.000	0,22%
Beban Tunj. PPh PNS	4.436.276	4.663.570	(227.294)	(4,87%)
Beban Tunj. Beras PNS	32.806.260	33.892.560	(1.086.300)	(3,21%)
Beban Uang Makan PNS	66.601.000	68.414.000	(1.813.000)	(2,65%)
Beban Tunjangan Umum PNS	10.320.000	6.655.000	3.665.000	55,07%
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	32.400.000	32.400.000	0	0,00%
Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	641.211.171	128.484.565	512.726.606	399,06%
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.393.400.000	677.830.000	1.715.570.000	253,10%
Belanja Gaji Pokok PPPK	147.893.825	22.870.400	125.023.425	546,66%
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.860	436	2.424	555,96%

Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7.051.451	2.287.040	4.764.411	208,32%
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.442.617	0	1.442.617	100%
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.800.000	2.800.000	0	0,00%
Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.676.520	1.158.720	6.517.800	562,50%
Belanja Uang Makan PPPK	22.230.000	2.520.000	19.710.000	782,14%
Belanja Tunjangan Umum PPPK	7.938.750	0	7.938.750	100%
Total Belanja Brutto	4.107.928.949	1.705.161.983	2.402.766.966	140,91%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00%
Total Belanja Neto	4.107.928.949	1.705.161.983	2.402.766.966	140,91%

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang:
Rp566.521.563

Realisasi belanja barang Pengadilan Agama Tanjungpandan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp566.521.563 dan Rp522.195.129.

Rincian belanja barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	285.321.112	275.686.380	9.634.732	3,49%
Belanja Barang Non Operasional	1.440.000	700.000	740.000	105,71%
Belanja Persediaan	20.218.000	21.165.100	(947.100)	(4,47%)
Belanja Jasa	74.967.795	25.849.804	49.117.991	190,01%
Belanja Pemeliharaan	97.011.484	158.376.799	(61.365.315)	(38,75%)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	87.563.172	40.417.046	47.146.126	116,65%
Total Belanja Brutto	566.521.563	522.195.129	44.326.434	8,49%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Neto	566.521.563	522.195.129	44.326.434	8,49%

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja
Modal:
Rp19.999.998*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Tanjungpandan per 30 Juni 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp19.999.998 dan Rp109.999.200. Rincian belanja modal dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal	19.999.998	109.999.200	(89.999.202)	(81,82%)
Total Belanja Brutto	19.999.998	109.999.200	(89.999.202)	(81,82%)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0%
Total Belanja Neto	19.999.998	109.999.200	(89.999.202)	(81,82%)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar:
Rp55.727.774*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp55.727.774 dan Rp21.230.614. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian aset lancar pada Pengadilan Agama Tanjungpandan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran	36.000.000	0
Belanja Dibayar Di Muka	0	4.245.556
Piutang Bukan Pajak	51.414	0
Persediaan	19.676.360	16.985.058
Total Aset Lancar	55.727.774	21.230.614

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran:
Rp36.000.000*

Kas di bendahara pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja. Rincian kas di bendahara pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	Uang Tunai	2.816.636	0
2	Uang di Rekening Bank	24.040.464	0
3	Kuitansi UP Belum di SPJ kan	9.142.900	0
Total		36.000.000	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka*Belanja di Bayar di
Muka: Rp0*

Belanja dibayar di muka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp4.245.556. Belanja dibayar di muka adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran terlebih dahulu, tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut belum diterima.

Rincian belanja dibayar di muka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	Web Hosting	0	1.231.767
2	VPS CCTV	0	188.700
3	Cloud Storage	0	88.800
4	Video Conference	0	2.736.289
Total		0	4.245.556

C.1.3. Piutang Bukan Pajak*Piutang Bukan
Pajak: Rp51.414*

Piutang bukan pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp51.414 dan Rp0. Piutang PNPB adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya.

Rincian piutang bukan pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	51.414	0
Total		51.414	0

C.1.4. Persediaan

Persediaan:
Rp19.676.360

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp19.676.360 dan Rp16.985.058. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	Barang Konsumsi	15.575.450	13.142.608
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	4.100.910	3.842.450
Total		19.676.360	16.985.058

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap:
Rp11.236.619.339

Nilai aset tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 tersaji sebesar Rp11.236.619.339 dan Rp11.329.026.055. Aset tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional dan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian aset tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025	Perubahan
1	Tanah	8.951.568.000	8.951.568.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.065.825.779	2.048.471.779	17.354.000
3	Gedung dan Bangunan	2.947.715.000	2.947.715.000	0
4	Aset Tetap Lainnya	927.109	927.109	0
5	Akumulasi Penyusutan	(2.729.416.549)	(2.619.655.833)	(109.760.716)
Jumlah Aset Tetap		11.236.619.339	11.329.026.055	(92.406.716)

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp8.951.568.000

Nilai aset tetap berupa tanah per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp8.951.568.000 dan Rp8.951.568.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah

(dalam satuan rupiah)

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	2.994 M2	29.03.01.06.4.00105	Pemerintah RI	Bangunan gedung kantor Pengadilan Agama Tanjungpandan	8.253.955.000
2	2	500 M2	29.03.01.14.4.00008	Pemerintah RI	Rencana pembangunan Rumah Dinas Pengadilan Agama Tanjungpandan(	617.613.000
3	3	4.000 M2	-	Pemda Kab. Belitang Timur	Lokasi gedung kantor	80.000.000
Jumlah						8.951.568.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
mesin:
Rp2.065.825.779

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp2.065.825.779 dan Rp2.048.471.779.

Rincian peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Peralatan dan Mesin
(dalam satuan rupiah)

No.	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	12	510,332,000
2	ALAT KANTOR	26	149,000,500
3	ALAT RUMAH TANGGA	96	463,327,289
4	ALAT STUDIO	3	25,850,000
5	ALAT KOMUNIKASI	8	90,770,000
6	KOMPUTER UNIT	43	536,429,400
7	PERALATAN KOMPUTER	18	290,116,590
Jumlah Peralatan dan Mesin		206	2.065.825.779

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin
(dalam satuan rupiah)

Saldo per 1 Januari 2026	2.048.471.779
Mutasi Tambah	17.354.000
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	2.065.825.779
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(1.915.438.829)
Nilai Buku 30 Juni 2026	150.386.950

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan:
Rp2.947.715.000*

Nilai perolehan aset tetap berupa gedung dan bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp2.947.715.000 dan Rp2.947.715.000.

Mutasi transaksi terhadap gedung dan bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan
(dalam satuan rupiah)

Saldo per 1 Januari 2026	2.947.715.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	2.947.715.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(813.977.720)
Nilai Buku 30 Juni 2026	2.133.737.280

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp927.109*

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan aset tetap lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp927.109 dan Rp927.109.

Mutasi nilai aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap Lainnya
(dalam satuan rupiah)

Saldo per 1 Januari 2026	927.109
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	927.109
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	927.109

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A laporan keuangan ini.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap:
Rp(2.729.416.549)*

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp(2.729.416.549) dan Rp(2.619.655.833).

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Rangkuman akumulasi penyusutan aset tetap 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran A laporan keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	8.951.568.000		
2	Peralatan dan Mesin	2.065.825.779	-	8.951.568.000
3	Gedung dan Bangunan	2.947.715.000	(1.915.438.829)	150.386.950
4	Aset Tetap Lainnya	927.109	(813.977.720)	2.133.737.280
Jumlah		13.966.035.888	(2.729.416.549)	11.236.619.339

C.3. Aset Lain-Lain

Aset Lainnya:
Rp960.308.153

Saldo aset lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp960.308.153 dan Rp960.308.153. Aset Lain-Lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Tanjungpandan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset Lain-Lain dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Aset Tetap Lainnya
(dalam satuan rupiah)

Saldo per 1 Januari 2025	960.308.153
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2026	960.308.153
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(960.308.153)
Nilai Buku Per 30 Juni 2026	0

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka
Pendek:
Rp470.624.833*

Nilai kewajiban jangka pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp470.624.833 dan Rp619.808.478. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian kewajiban jangka pendek pada Pengadilan Agama Tanjungpandan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Utang Kepada Pihak Ketiga	425.481.933	619.808.478
Utang Belum Ditagihkan	9.142.900	0
Uang Muka dari KPPN	36.000.000	0
Jumlah	470.624.833	619.808.478

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga:
Rp425.481.933*

Jumlah utang kepada pihak ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp184.966.933 dan Rp619.808.478. Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian utang pihak ketiga pengadilan agama Tanjungpandan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
(dalam satuan Rupiah)

No	Kode	Uraian	Jumlah
1	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	425.481.933
2	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Total			425.481.933

C.4.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan:
Rp9.142.900*

Jumlah utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp9.142.900 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

Adapun rincian utang yang belum ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan
(dalam satuan Rupiah)

No	Kode	Uraian	Jumlah
1	218111	Utang Yang Belum Diterima tagihannya	9.142.900
Total			9.142.900

C.4.3 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp36.000.000*

Saldo uang muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp36.000.000 dan Rp0. Uang muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN adalah akun pasangan dari kas di bendahara pengeluaran yang ada di kelompok akun aset lancar.

C.5. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp10.821.722.280*

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp10.821.722.280 dan Rp10.731.066.191. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Operasional

D.1.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP: Rp359.898*

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp359.898 dan Rp359.898. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan serta pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi.

Rincian pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
2	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	617.000	359.898	50
Total Pendapatan		617.000	359.898	50

D.2. Beban Operasional

D.2.1. Beban Pegawai

*Beban Pegawai:
Rp3.921.520.271*

Jumlah beban pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp3.921.520.271 dan Rp1.916.143.508. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan 2025 (dalam satuan Rupiah)				
Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik/Turun	%
Beban Gaji Pokok PNS	707,399,800	703.516.900	3.882.900	0,55%
Beban Pembulatan Gaji PNS	10,491	11.175	(684)	(6,12%)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	40,607,620	40.630.920	(23.300)	(0,06%)
Beban Tunj. Anak PNS	15,673,136	16.519.824	(846.688)	(5,13%)
Beban Tunj. Struktural PNS	23,400,000	23.400.000	0	0,00%
Beban Tunj. Fungsional PNS	36,225,000	36.780.000	(555.000)	(1,51%)
Beban Tunj. PPh PNS	4,436,276	4.677.319	(241.043)	(5,15%)
Beban Tunj. Beras PNS	36,789,360	38.382.600	(1.593.240)	(4,15%)
Beban Uang Makan PNS	66,601,000	68.414.000	(1.813.000)	(2,65%)
Beban Tunjangan Umum PNS	11,610,000	8.130.000	3.480.000	42,80%
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	37,800,000	37.800.000	0	0,00%
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	552,283,225	140.574.608	411.708.617	292,88%
Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,168,000,000	762.030.000	1.405.970.000	184,50%
Beban Gaji Pokok PPPK	167,987,925	25.729.200	142.258.725	552,91%
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,226	482	2.744	569,29%
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,917,841	2.572.920	5.344.921	207,74%
Beban Tunjangan Anak PPPK	1,671,221	0	1.671.221	-
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,150,000	3.150.000	0	0,00%
Beban Tunjangan Beras PPPK	8,690,400	1.303.560	7.386.840	566,67%
Beban Uang Makan PPPK	22,230,000	2.520.000	19.710.000	782,14%
Beban Tunjangan Umum PPPK	9,033,750	0	9.033.750	-
Total Belanja Bruto	3.921.520.271	1.582.664.168	2.005.376.763	104,66%
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Neto	3.921.520.271	1.916.143.508	2.005.376.763	104,66%

D.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan: Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp12.199.158 dan Rp10.643.622. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun	%
Beban Persediaan Konsumsi	12.199.158	10.643.622	1.555.536	14.61
Total Beban Persediaan	12.199.158	10.643.622	1.555.536	14.61

D.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa: Jumlah beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp364.087.594 dan Rp331.855.550. Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian beban jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun	%
Beban Barang dan Jasa	364.087.594	331.855.550	32.232.044	9,71%
Total Beban Barang dan Jasa	364.087.594	331.855.550	32.232.044	9,71%

D.2.4. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp107.496.924*

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp107.496.924 dan Rp165.469.799. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik/Turun	%
Beban Pemeliharaan	107.496.924	165.469.799	(57.972.875)	(35,04%)
Total Beban Pemeliharaan	107.496.924	165.469.799	(57.972.875)	(35,04%)

D.2.5. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas:
Rp88.163.172*

Beban perjalanan dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp88.163.172 dan Rp40.417.046. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian beban perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun	%
Beban Perjalanan Dinas	88.163.172	40.417.046	47.746.126	118,13%
Total Beban Perjalanan Dinas	88.163.172	40.417.046	47.746.126	118,13%

D.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi:
Rp110.378.716*

Jumlah beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp110.378.716 dan Rp117.978.380. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	110.378.716	117.978.380	(7.599.664)	(6,44%)
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	110.378.716	117.978.380	(7.599.664)	(6,44%)

D.2.7. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang tak
Tertagih: Rp0*

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian beban penyisihan piutang tak tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun	%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.3. Kegiatan Non Operasional

*Surplus/defisit
Kegiatan Non
Operasional: Rp0*

Pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas yaitu masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap sebesar Rp0. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal:
Rp10.731.066.191*

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp10.731.066.191 dan Rp11.442.183.659.

E.2. Surplus/defisit LO

*Surplus/defisit
LO:
(Rp4.603.485.937)*

Jumlah/deficit-LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp4.603.485.937) dan (Rp2.582.148.007). Surplus/deficit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset

*Selisih Revaluasi
Aset: Rp0*

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih revaluasi aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Selisih revaluasi aset tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan, serta irigasi di Pengadilan Agama Tanjungpandan.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi:
Rp0*

Koreksi aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jenis Aset Tetap	Koreksi		Total
	Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Irigasi	0	0	0
Jumlah	0	0	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas:
Rp4.694.142.026*

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp4.694.142.026 dan Rp2.337.047.828. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik/Turun	%
Transaksi Antar Entitas	4.694.142.026	2.337.047.828	2.357.094.198	100.86
Transaksi Antar Entitas	4.694.142.026	2.337.047.828	2.357.094.198	100.86

E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir:
Rp10.821.722.280*

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp10.821.722.280 dan Rp11.197.083.480.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian(kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Sampai dengan 30 Juni 2026, tidak ada pemeriksaan dari BPK ke Pengadilan Agama Tanjungpandan maka tidak ada yang perlu ditindaklanjuti.

F.2.1. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual per 30 Juni 2026.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah:

1. BRI CABANG TANJUNGPANDAN A/C 00000131-01-000434-30-3 a.n BPg 107 PA TANJUNGPANDAN (01) yang digunakan sebagai penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp24.040.464.

F.2.3. Revisi DIPA

Pengadilan Agama Tanjungpandan hingga 30 Juni 2026 telah melakukan lima kali revisi DIPA, yaitu:

1. Revisi ke-1 tanggal 24 Desember 2025, revisi DJA berupa pencantuman/penghapusan/pencatatan halaman IV A DIPA dan pergeseran anggaran ke RO khusus dalam rangka pemenuhan anggaran prioritas direktif presiden.
2. Revisi ke-2 tanggal 6 Januari 2026, revisi KPA pemutakhiran data revisi POK.
3. Revisi ke-3 tanggal 13 Februari 2026, revisi DJPb, pemutakhiran data revisi POK, pencantuman/perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.

4. Revisi ke-4 tanggal 3 Maret 2026, revisi KPA, pemutakhiran data revisi POK.
5. Revisi ke-5 tanggal 9 April 2026, revisi DJA, revisi dalam hal pagu anggaran berubah, tambahan anggaran DIPA TA 2026.
6. Revisi ke-6 tanggal 8 Mei 2026, revisi DJPb, pemutakhiran data revisi POK, pencantuman/perubahan rencana penarikan dana atau perkiraan penerimaan dalam halaman III DIPA.
7. Revisi ke-7 tanggal 17 Juni 2026, revisi PA, revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (pagu anggaran unit organisasi tetap dan pagu anggaran antar satker berubah, pencantuman/penghapusan/perubahan catatan jalaman IV DIPA, serta pemutakhiran POK.

F.2.4. Ralat SPM, SSBP dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM Pengadilan Agama Tanjungpandan hingga 30 Juni 2026.

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

1. Selama periode pelaporan, terdapat ketidaksesuaian akun versus kodefikasi BMN pada kegiatan belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp2.645.998 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

NO	Akun	Nama Barang	Kode Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	532111	Meja Telepon	3050201013	2 Unit	661.499	1.322.998
2	532111	Meja Telepon	3050201013	2 Unit	661.500	1.323.000
Jumlah						2.645.998

Dimana seharusnya pembelian barang tersebut adalah menggunakan akun 521252 belanja peralatan dan mesin - ekstrakomptabel karena harga satuan barangnya tidak mencapai nilai kapitalisasi aset yaitu Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Atas ketidaksesuaian tersebut KPPN Tanjungpandan telah memberikan rekomendasi agar dilakukan koreksi SPM atas pembebanan pembayarannya dari akun 532111 (belanja modal peralatan dan mesin) ke akun 521252 (belanja peralatan dan mesin - ekstrakomptabel), namun hingga saat ini belum berhasil ditindaklanjuti karena di dalam DIPA PA Tanjungpandan tidak tersedia pagu yang dapat digunakan untuk pelaksanaan koreksi SPM tersebut. Untuk mengalokasikan pagu anggaran akun 521252 (belanja peralatan dan mesin - ekstrakomptabel) guna koreksi SPM tersebut Pengadilan Agama Tanjungpandan telah melakukan revisi

DIPA melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung dengan cara pergeseran anggaran yang berasal dari belanja operasional. Namun pada saat pengiriman usulan revisi DIPA, terjadi gagal validasi oleh sistem pada aplikasi SAKTI sehingga proses revisi tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, sampai dengan saat laporan ini kami sampaikan untuk rekomendasi tindak lanjut koreksi SPM tersebut belum dapat kami laksanakan.

2. Alokasi pagu anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan yang belum maksimal dalam satu tahun anggaran dengan kondisi bangunan gedung kantor Pengadilan yang belum prototype sehingga membutuhkan anggaran pemeliharaan yang harus memadai. Masih terdapat rencana pemeliharaan yang seharusnya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan namun terkendala karena keterbatasan anggaran. Di samping itu perlu penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa alat pengolah data, dikarenakan alat pengolah data yang ada saat ini sudah banyak yang kondisinya rusak berat.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI
PEROLEHAN, AKUMULASI
PENYUSUTAN, DAN NILAI
BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Tanjung Pandan
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2026

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
A.	Tanah	8.951.568.000	0	8.951.568.000
1	TANAH PERSIL	8.951.568.000	0	8.951.568.000
B.	Peralatan dan Mesin	2.065.825.779	(1.915.438.829)	150.386.950
1.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	510.332.000	(488.117.715)	22.214.285
2.	ALAT KANTOR	149.000.500	(149.000.500)	0
3.	ALAT RUMAH TANGGA	463.327.289	(370.709.249)	92.618.040
4.	ALAT STUDIO	25.850.000	(25.850.000)	0
5.	ALAT KOMUNIKASI	90.770.000	(90.770.000)	0
6.	KOMPUTER UNIT	536.429.400	(533.304.400)	3.125.000
7.	PERALATAN KOMPUTER	290.116.590	(257.686.965)	32.429.625
C.	Gedung dan Bangunan	2.947.715.000	(813.977.720)	2.133.737.280
1.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2.750.646.000	(698.454.510)	2.052.191.490
2.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	197.069.000	(115.523.210)	81.545.790
D.	Aset Tetap Lainnya	927.109	0	927.109
1.	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	927.109	0	927.109
E.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	960.308.153	(960.308.153)	0
1.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2.210.000	(2.210.000)	0
2.	ALAT PENGOLAHAN	1.999.635	(1.999.635)	0
3.	ALAT KANTOR	142.968.561	(142.968.561)	0
4.	ALAT RUMAH TANGGA	228.183.691	(228.183.691)	0
5.	ALAT STUDIO	41.793.000	(41.793.000)	0
6.	ALAT KOMUNIKASI	22.079.816	(22.079.816)	0
7.	KOMPUTER UNIT	419.048.950	(419.048.950)	0
8.	PERALATAN KOMPUTER	101.879.500	(101.879.500)	0
9.	PERALATAN OLAH RAGA	145.000	(145.000)	0
	Jumlah	14.926.344.041	(3.689.724.702)	11.236.619.339



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KPPN TANJUNG PANDAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 402318 - PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 29/07/26 4:07

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,209,693,000	8,209,693,000	0
2	Belanja	4,694,450,510	4,694,450,510	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	617,000	617,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	308,484	308,484	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	36,000,000	36,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	36,000,000	36,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 20 Juli 2026



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN 402318

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM
Tgl Cetak : 27/07/26 10:48 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	617,000	308,484	(308,516)	50	617,000	308,484	308,516	50
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	617,000	308,484	(308,516)	50	617,000	308,484	308,516	50
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	617,000	308,484	(308,516)	50	617,000	308,484	308,516	50
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	8,209,693,000	4,694,450,510	(3,515,242,490)	57	3,796,752,000	2,337,356,312	1,459,395,688	62
1. Belanja Pegawai	6,866,616,000	4,107,928,949	(2,758,687,051)	60	2,537,874,000	1,705,161,983	832,712,017	67
2. Belanja Barang	1,323,077,000	566,521,563	(756,555,437)	43	1,148,878,000	522,195,129	626,682,871	45
3. Belanja Modal	20,000,000	19,999,998	(2)	100	110,000,000	109,999,200	800	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN 402318

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM
Tgl Cetak : 27/07/26 10:48 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	8,209,693,000	4,694,450,510	(3,515,242,490)	57	3,796,752,000	2,337,356,312	1,459,395,688	62
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



Tanjungpandan, 27 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

HADI SISWANTO
Pembina, IV/a 198003292009121001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (402318) PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 10:48 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	36,000,000	0	36,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	4,245,556	(4,245,556)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	51,414	0	51,414	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	51,414	0	51,414	0.00
Persediaan	19,676,360	16,985,058	2,691,302	15.85
JUMLAH ASET LANCAR	55,727,774	21,230,614	34,497,160	162.49
ASET TETAP				
Tanah	8,951,568,000	8,951,568,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,065,825,779	2,048,471,779	17,354,000	0.85
Gedung dan Bangunan	2,947,715,000	2,947,715,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	927,109	927,109	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,729,416,549)	(2,619,655,833)	(109,760,716)	4.19
JUMLAH ASET TETAP	11,236,619,339	11,329,026,055	(92,406,716)	(0.82)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	960,308,153	960,308,153	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(960,308,153)	(959,690,153)	(618,000)	0.06
JUMLAH ASET LAINNYA	0	618,000	(618,000)	(100.00)
JUMLAH ASET	11,292,347,113	11,350,874,669	(58,527,556)	(0.52)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	425,481,933	619,808,478	(194,326,545)	(31.35)
Utang Yang Belum Ditagihkan	9,142,900	0	9,142,900	0.00
Uang Muka dari KPPN	36,000,000	0	36,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	470,624,833	619,808,478	(149,183,645)	(24.07)
JUMLAH KEWAJIBAN	470,624,833	619,808,478	(149,183,645)	(24.07)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	10,821,722,280	10,731,066,191	90,656,089	0.84
JUMLAH EKUITAS	10,821,722,280	10,731,066,191	90,656,089	0.84
JUMLAH EKUITAS	10,821,722,280	10,731,066,191	90,656,089	0.84
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	11,292,347,113	11,350,874,669	(58,527,556)	(0.52)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (402318) PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM
Tgl Cetak : 27/07/26 10:48 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL



Tanjungpandan, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Peserta Pengguna Anggaran

HADI SISWANTO

Pembina, N/a 198003292009121001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (402318) PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM
 Tgl Cetak : 27/07/26 10:47 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	359,898	359,898	0	0
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	359,898	359,898	0	0
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	359,898	359,898	0	0
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,921,520,271	1,916,143,508	2,005,376,763	104.657
Beban Persediaan	12,199,158	10,643,622	1,555,536	14.615
Beban Barang dan Jasa	364,087,594	331,855,550	32,232,044	9.713
Beban Pemeliharaan	107,496,924	165,469,799	(57,972,875)	(35.035)
Beban Perjalanan Dinas	88,163,172	40,417,046	47,746,126	118.134
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : (402318) PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 10:47 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	110,378,716	117,978,380	(7,599,664)	(6.442)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,603,845,835	2,582,507,905	2,021,337,930	78.27
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,603,485,937)	(2,582,148,007)	(2,021,337,930)	78.281
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,603,485,937)	(2,582,148,007)	(2,021,337,930)	78.281
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,603,485,937)	(2,582,148,007)	(2,021,337,930)	78.281

Keterangan :
FINAL



Tanjungpandan, 27 Juli 2026
Pepanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
HADI SISWANTO
Pembina, IV/a 198003292009121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (402318) PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:35 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 10:48 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	10,731,066,191	11,442,183,659	(711,117,468)	(6.21)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,603,485,937)	(2,582,148,007)	(2,021,337,930)	78.28
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,694,142,026	2,337,047,828	2,357,094,198	100.86
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	90,656,089	(245,100,179)	335,756,268	(136.99)
EKUITAS AKHIR	10,821,722,280	11,197,083,480	(375,361,200)	(3.35)

Keterangan :

FINAL



Tanjungpandan, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HADI SISWANTO

Pembina, IV/a 198003292009121001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 3000 BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : 402318 PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 27/07/26 10:49 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	617,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	308,484	0	308,484	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	617,000	308,484	0	308,484	50
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	617,000	308,484	0	308,484	50
	JUMLAH PENDAPATAN	617,000	308,484	0	308,484	50

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 3000 **BANGKA BELITUNG**
SATUAN KERJA : 402318 **PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 27/07/26 10:49 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 27/7/26 10:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,144,000,000	1,092,952,000	626,621,800	0	626,621,800	57.33	466,330,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	20,000	9,275	0	9,275	46.38	10,725
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	62,000,000	62,000,000	35,980,330	0	35,980,330	58.03	26,019,670
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	25,000,000	25,000,000	14,106,814	0	14,106,814	56.43	10,893,186
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	37,200,000	37,200,000	20,800,000	0	20,800,000	55.91	16,400,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	56,900,000	56,900,000	32,200,000	0	32,200,000	56.59	24,700,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,000,000	5,428,000	4,436,276	0	4,436,276	81.73	991,724
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	51,000,000	51,000,000	32,806,260	0	32,806,260	64.33	18,193,740
511129	Belanja Uang Makan PNS	240,000,000	236,572,000	66,601,000	0	66,601,000	28.15	169,971,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	21,000,000	21,000,000	10,320,000	0	10,320,000	49.14	10,680,000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	64,800,000	64,800,000	32,400,000	0	32,400,000	50	32,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,703,920,000	1,652,872,000	876,281,755	0	876,281,755	53.02	776,590,245
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	177,000,000	952,024,000	641,211,171	0	641,211,171	67.35	310,812,829
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,188,400,000	3,868,402,000	2,393,400,000	0	2,393,400,000	61.87	1,475,002,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,365,400,000	4,820,426,000	3,034,611,171	0	3,034,611,171	62.95	1,785,814,829
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	284,000,000	284,000,000	147,893,825	0	147,893,825	52.08	136,106,175
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	18,000	18,000	2,860	0	2,860	15.89	15,140
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15,000,000	11,794,000	7,051,451	0	7,051,451	59.79	4,742,549
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3,206,000	1,442,617	0	1,442,617	45	1,763,383
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	4,900,000	2,800,000	0	2,800,000	57.14	2,100,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,000,000	13,000,000	7,676,520	0	7,676,520	59.05	5,323,480
511628	Belanja Uang Makan PPPK	60,000,000	60,000,000	22,230,000	0	22,230,000	37.05	37,770,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	16,400,000	16,400,000	7,938,750	0	7,938,750	48.41	8,461,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	393,318,000	393,318,000	197,036,023	0	197,036,023	50.1	196,281,977
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	3,462,638,000	6,866,616,000	4,107,928,949	0	4,107,928,949	59.82	2,758,687,051
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	612,974,000	603,900,000	263,203,112	0	263,203,112	43.58	340,696,888
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000,000	954,000	78,000	0	78,000	8.18	876,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,120,000	48,120,000	20,050,000	0	20,050,000	41.67	28,070,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,000,000	3,600,000	1,990,000	0	1,990,000	55.28	1,610,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 3000 **BANGKA BELITUNG**
SATUAN KERJA : 402318 **PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 27/07/26 10:49 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 27/7/26 10:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	668,094,000	656,574,000	285,321,112	0	285,321,112	43.46	371,252,888
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,800,000	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,100,000	1,740,000	1,440,000	0	1,440,000	82.76	300,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	42,136,000	44,906,000	20,218,000	0	20,218,000	45.02	24,688,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	42,136,000	44,906,000	20,218,000	0	20,218,000	45.02	24,688,000
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	86,868,000	83,494,000	41,745,555	0	41,745,555	50	41,748,445
522112	Belanja Langganan Telepon	1,200,000	1,200,000	769,452	0	769,452	64.12	430,548
522141	Belanja Sewa	58,760,000	58,916,000	32,452,788	0	32,452,788	55.08	26,463,212
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,600,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	148,428,000	143,610,000	74,967,795	0	74,967,795	52.2	68,642,205
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	158,752,000	175,814,000	55,576,500	0	55,576,500	31.61	120,237,500
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10,500,000	9,975,000	0	0	0	0	9,975,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	159,336,000	145,218,000	41,434,984	0	41,434,984	28.53	103,783,016
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	328,588,000	331,007,000	97,011,484	0	97,011,484	29.31	233,995,516
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142,840,000	142,840,000	86,513,172	0	86,513,172	60.57	56,326,828
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	2,400,000	1,050,000	0	1,050,000	43.75	1,350,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	145,240,000	145,240,000	87,563,172	0	87,563,172	60.29	57,676,828
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,334,586,000	1,323,077,000	566,521,563	0	566,521,563	42.82	756,555,437
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,000,000	20,000,000	19,999,998	0	19,999,998	100	2
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	20,000,000	20,000,000	19,999,998	0	19,999,998	100	2
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	20,000,000	20,000,000	19,999,998	0	19,999,998	100	2
	JUMLAH BELANJA	4,817,224,000	8,209,693,000	4,694,450,510	0	4,694,450,510	57.18	3,515,242,490

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (402318) PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 10:48 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	36,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	51,414	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	15,575,450	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	4,100,910	0
0.0	131111	Tanah	8,951,568,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,065,825,779	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,947,715,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	927,109	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,915,438,829
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	813,977,720
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	960,308,153	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	960,308,153
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	425,481,933
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	9,142,900
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	36,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,694,450,510
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	308,484	0
0.0	391111	Ekuitas	0	10,731,066,191
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	359,898
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	707,399,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,491	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	40,607,620	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	15,673,136	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	23,400,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	36,225,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	4,436,276	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	36,789,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	66,601,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	11,610,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	37,800,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	552,283,225	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,168,000,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	167,987,925	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3,226	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,917,841	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,671,221	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,150,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	8,690,400	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (402318) PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:48 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 10:48 AM

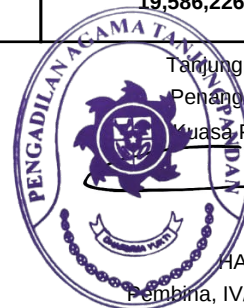
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	22,230,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	9,033,750	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	266,962,096	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	78,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20,050,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3,580,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4,085,998	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	34,423,980	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	734,265	0
3.0	522141	Beban Sewa	33,873,255	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55,576,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43,528,884	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	87,113,172	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,050,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	68,762,043	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	40,998,673	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	618,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	12,199,158	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,391,540	0
JUMLAH			19,586,226,134	19,586,226,134

Keterangan :

FINAL



Tanjungpandan, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Muasa Pengguna Anggaran

HADI SISWANTO

Pembina, IV/a 198003292009121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (402318) PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:35 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 10:49 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,694,450,510
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	308,484	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	308,484
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	626,621,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,275	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	35,980,330	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,106,814	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20,800,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	32,200,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,436,276	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	32,806,260	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	66,601,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,320,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	32,400,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	641,211,171	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,393,400,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	147,893,825	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,860	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,051,451	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,442,617	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,800,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7,676,520	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	22,230,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,938,750	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	263,203,112	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	78,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,050,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,990,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,218,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	41,745,555	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	769,452	0
3.0	522141	Belanja Sewa	32,452,788	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55,576,500	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,434,984	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86,513,172	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,050,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19,999,998	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (402318) PENGADILAN AGAMA TANJUNG PANDAN

Tgl Data : 27/07/26 9:35 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 10:49 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			4,694,758,994	4,694,758,994

Keterangan :

FINAL



Tanjungpandan, 27 Juli 2026

Peranggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HADI SISWANTO

198003292009121001